

Pengaruh Kepercayaan Politik terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Sepaku dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Muhammad Faisal Hidayat*, Mochammad Sa'id

Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Malang, Indonesia

*Penulis korespondensi: muhammad.faisal.2108116@students.um.ac.id

Paper received: 28-01-2026; revised: 20-03-2026; accepted: 01-04-2026

Abstract

The development of the Nusantara Capital City is a national strategic project that requires active public participation, particularly from those directly affected, such as the residents of Sepaku District. However, the low level of political participation among the community remains a major issue that needs to be examined more thoroughly. This study aims to determine the influence of political trust on the political participation of the Sepaku community in the development of IKN. A correlational quantitative approach was used. The instruments applied were the Citizen Trust in Government Organizations (CTGO) scale to measure political trust and the Participatory Behaviors Scale (PBS) to assess political participation. A total of 433 respondents were selected using probability sampling with the cluster sampling method from eight villages/sub-districts. The data analysis method used was simple linear regression. The results showed a significant influence of political trust on political participation, with a significance value of 0.000 ($p < 0.05$) and a coefficient of determination of 0.058. This indicates that political trust contributes 5.8% to the political participation of the community. Although the contribution is relatively small, the findings affirm that trust in government plays an important role in enhancing public engagement in the development of IKN.

Keywords: nusantara capital city; political trust; political participation; Sepaku community

Abstrak

Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan proyek strategis nasional yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat, khususnya mereka yang terdampak langsung seperti masyarakat Kecamatan Sepaku. Namun, rendahnya partisipasi politik masyarakat menjadi permasalahan utama yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan politik terhadap partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sepaku dalam pembangunan IKN. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif korelasional. Instrumen yang digunakan adalah skala Citizen Trust in Government Organizations (CTGO) untuk mengukur kepercayaan politik dan Participatory Behaviors Scale (PBS) untuk mengukur partisipasi politik. Sampel diambil sebanyak 433 responden menggunakan teknik probability sampling dengan jenis cluster sampling dari delapan desa/kelurahan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kepercayaan politik terhadap partisipasi politik, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$) dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,058. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan politik berkontribusi sebesar 5,8% terhadap partisipasi politik masyarakat. Meskipun kontribusinya tergolong kecil, temuan ini menegaskan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah memainkan peran penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan IKN.

Kata kunci: ibu kota nusantara; kepercayaan politik; masyarakat sepaku; partisipasi politik

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional yang saat ini sedang dilaksanakan adalah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, memindahkan Ibu Kota Negara ke wilayah Kalimantan Timur, yang bertempat di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Upaya tersebut diambil guna mendukung Visi Indonesia 2045 yang menargetkan Indonesia menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar di dunia melalui serangkaian transformasi ekonomi yang diperlukan untuk merealisasikan visi tersebut (Faustina dkk., 2023). Salah satu kecamatan yang terdampak langsung adalah Kecamatan Sepaku, yang secara administratif menjadi bagian dari kawasan inti pusat pemerintahan IKN dan memiliki jumlah penduduk sekitar 40.322 jiwa pada tahun 2024 (BPS, 2024). Meskipun demikian, partisipasi masyarakat Kecamatan Sepaku dalam konsultasi dan perencanaan pembangunan IKN masih tergolong rendah, tingkat partisipasi masyarakat dalam forum konsultasi publik terkait pembangunan IKN di wilayah Sepaku dikategorikan sebagai “*vague awareness*”. Ini artinya, warga mengetahui rencana pemindahan IKN, tetapi tidak dilibatkan dalam proses formal pengambilan keputusan (Dewi dkk., 2020).

Partisipasi masyarakat dalam rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur masih tergolong rendah. Pemerintah belum menyediakan mekanisme yang memadai untuk melibatkan masyarakat secara langsung, baik melalui forum diskusi resmi maupun wadah aspirasi yang terstruktur (Alamsyah, 2019). Partisipasi politik masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Indonesia, termasuk pada pembangunan IKN sering kali hanya bersifat formalitas dengan pemberian informasi sepihak tanpa melibatkan masyarakat adat dan kelompok terdampak dalam pengambilan keputusan (Hamdani, 2020). Ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan IKN berada pada tahap *informing*, yaitu masyarakat hanya berperan sebagai penerima informasi tanpa dilibatkan maupun memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik di Indonesia bervariasi dan dipengaruhi berbagai faktor, namun meskipun telah didorong melalui berbagai mekanisme, keterlibatan tersebut masih terhambat oleh rendahnya pendidikan, keterbatasan akses informasi, serta perbedaan budaya partisipasi di tiap komunitas (Nelly, 2024). Kecamatan Sepaku dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan bagian dari kawasan inti pembangunan IKN, bukan sekadar daerah penyangga. Kecamatan Sepaku khususnya Desa Bumi Harapan menjadi pusat pengembangan infrastruktur utama seperti sistem penyediaan air minum dan koridor permukiman (Pramesti & Jumansyah, 2024). Daerah ini juga mengalami pertumbuhan

ekonomi lokal setelah penetapan sebagai lokasi IKN. Selain itu, penelitian lain menjelaskan bahwa masyarakat Sepaku menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih rendah dibandingkan dengan kecamatan lain seperti Samboja, dengan tingkat partisipasi jauh di bawah kecamatan penyangga (Dewi dkk., 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun wilayah Sepaku terdampak langsung oleh pembangunan, tingkat keterlibatan warga dalam proses perumusan kebijakan masih minim. Oleh karena itu, penting untuk memfokuskan kajian pada Kecamatan Sepaku dalam upaya menelaah hubungan antara kepercayaan politik dan partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal

Minimnya partisipasi politik masyarakat juga tampak dalam hal pengambilan keputusan, yaitu adanya percepatan dalam pembahasan RUU IKN yang diselesaikan hanya dalam 42 hari saja. Padahal biasanya diperlukan waktu 130 hingga 160 hari untuk menyusun undang-undang di Indonesia (Mahardika & Saputra, 2022). Proses diskusi yang singkat ini dianggap kurang memberikan kesempatan yang memadai bagi masyarakat untuk terlibat terutama masyarakat adat seperti suku Balik dan Paser yang memiliki hak adat atas lahan yang terkena dampak pembangunan IKN (Faustina dkk., 2023). Selain itu, para aktivis lingkungan juga melakukan protes dengan membentangkan spanduk berisi ungkapan kekhawatiran kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan ini (Faturahman, 2024). Hal ini menandakan bahwa masyarakat melakukan *activism* sebagai salah satu aspek dari partisipasi politik, yaitu masyarakat berpartisipasi dalam bentuk demonstrasi dengan cara melakukan protes (Talò & Mannarini, 2015). Lebih lanjut lagi, Hasanah dkk., (2023) menyoroti minimnya partisipasi politik masyarakat lokal dalam proses pembuatan kebijakan terkait pemindahan IKN. Studi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Sepaku hampir tidak dilibatkan secara bermakna untuk memberikan aspirasi atau masukan dalam perumusan kebijakan, dan keikutsertaan mereka dalam konsultasi publik masih sangat rendah.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Kecamatan Sepaku, data diperoleh melalui survei awal menggunakan kuesioner sederhana yang disebarikan kepada 17 responden. Responden dalam studi ini merupakan masyarakat setempat yang memenuhi kriteria sebagai warga aktif dan memiliki hak dalam kegiatan musyawarah atau forum publik. Teknik pemilihan responden menggunakan *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu seperti usia, keterlibatan dalam kegiatan masyarakat, dan ketersediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian. Hasil studi menunjukkan bahwa tidak ada responden (0%) yang menyatakan pernah menyampaikan aspirasi dalam musyawarah desa maupun sosialisasi pemerintah. Sebanyak 82% responden menyatakan pernah hadir dalam forum formal namun hanya

sebagai pendengar tanpa memberikan pendapat, sedangkan 18% lainnya menyatakan tidak pernah hadir dalam forum formal tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bentuk partisipasi yang disebut aktif kategori rendah. Analisis ini menunjukkan meskipun responden menyatakan pernah hadir, namun keterlibatan mereka terbatas pada menyimak, bukan berkontribusi secara langsung. Masyarakat juga belum banyak terlibat dalam bentuk partisipasi politik seperti petisi, aksi damai, atau forum advokasi warga. Ditunjang oleh temuan lainnya, wilayah seperti Desa Telemow di Kecamatan Sepaku memang tercatat sebagai salah satu daerah dengan partisipasi pemilih rendah pada Pemilu 2024, hal ini memperkuat gambaran rendahnya partisipasi politik masyarakat di lapangan (Purwaniawan, 2023). Temuan ini sejalan dengan dimensi *civil participation* dari Bintang dkk., (2024) dan dimensi latent political participation menurut Ekman & Amnå, (2012), yang menunjukkan masyarakat memiliki kesadaran dan hadir di ruang politik, namun belum aktif dalam menyuarkan pendapat atau mengambil inisiatif politik yang konkrit.

Partisipasi politik masyarakat sangatlah penting dalam demokrasi dan pembangunan berkelanjutan, tidak hanya sebagai mekanisme untuk memastikan keadilan sosial, namun juga sebagai cara untuk meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan publik. Partisipasi politik masyarakat yang bermakna dapat membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan keberhasilan proyek pembangunan (Cox, 2010). partisipasi politik tidak hanya terbatas pada kegiatan pemilihan umum, tetapi juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan terhadap kebijakan, serta berperan aktif dalam program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah (Sa'id dkk., 2019). Partisipasi politik ini dapat ditingkatkan dan diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, masalah partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan IKN perlu diteliti lebih mendalam.

Untuk memahami lebih dalam mengenai partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan IKN, penelitian ini berfokus pada kajian tentang partisipasi politik masyarakat yang terdampak langsung. Partisipasi politik didefinisikan sebagai bentuk perilaku individu yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan atau keputusan politik, baik melalui jalur formal seperti memberikan suara dalam pemilu dan keterlibatan dalam kampanye maupun jalur non-formal seperti demonstrasi, diskusi publik, dan kampanye media sosial (Ekman & Amnå, 2012). Partisipasi politik diartikan sebagai segala bentuk tindakan individu untuk memengaruhi kebijakan publik atau proses politik, melalui dimensi *civil participation*, *formal political participation*, dan *activism* (Bintang dkk., 2024). Ketiga dimensi ini menggambarkan cakupan luas dari keterlibatan warga, dari jalur formal hingga aksi-aksi yang muncul dari inisiatif masyarakat secara langsung. Dengan demikian,

partisipasi politik tidak hanya dilihat dari kehadiran individu dalam pemilu, tetapi juga bagaimana mereka menyuarkan aspirasinya dalam berbagai arena kehidupan publik dan politik, baik melalui saluran resmi maupun melalui gerakan masyarakat. Individu yang memiliki partisipasi politik yang biasanya disebut sebagai individu yang aktif secara politik, terlibat dalam berbagai kegiatan politik seperti memberikan suara, mengikuti kampanye, atau berpartisipasi dalam aksi-aksi politik lainnya. Sebaliknya, individu dengan partisipasi rendah sering disebut sebagai individu yang kurang terlibat atau tidak aktif dalam kegiatan politik, yang mungkin menunjukkan ketidakpedulian terhadap proses politik.

Partisipasi politik generasi muda di Indonesia masih terbatas pada *voting*, kemudian keterlibatan dalam diskusi politik dan kampanye juga terbilang cukup rendah (Wahyuni & Adnan, 2024). Salah satu yang menentukan tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah adalah kepercayaan politik (Paige, 1971). Kepercayaan politik merupakan keyakinan individu bahwa pemerintah dan institusi politik memiliki kemampuan serta niat baik dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat (Wahyu & Sa'id, 2020). Kepercayaan didefinisikan sebagai kemauan individu untuk membuka diri terhadap pihak lain berdasarkan ekspektasi bahwa pihak tersebut akan bertindak sesuai kepentingan pihak yang mempercayai (Mayer dkk., 1995). Kepercayaan politik yaitu persepsi masyarakat bahwa pemerintah memiliki kemampuan (*competence*), bertindak demi kebaikan publik (*benevolence*), dan memiliki integritas (*integrity*) (Grimmelikhuijsen & Knies, 2017). Dimensi *competence* mengacu pada sejauh mana masyarakat menilai bahwa pemerintah mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan profesional, termasuk dalam merancang kebijakan, menyediakan layanan publik, serta merespons kebutuhan masyarakat. *Benevolence* merefleksikan keyakinan bahwa pemerintah memiliki niat baik dan benar-benar peduli terhadap kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata mengejar kepentingan kelompok elit atau pihak tertentu. Sementara itu, *integrity* menunjukkan persepsi masyarakat bahwa pemerintah jujur, transparan, menepati janji, dan bertindak konsisten dengan nilai-nilai moral serta prinsip keadilan. Individu dikatakan memiliki kepercayaan politik tinggi ketika ia percaya bahwa pemerintah dan institusi politiknya dapat dipercaya, menunjukkan keyakinan terhadap integritas, kompetensi, dan niat baik dari organisasi pemerintahan tersebut. Sebaliknya, kepercayaan politik rendah menunjukkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan dan niat baik pemerintah, serta keraguan terhadap integritas institusi politik. Kepercayaan ini biasa diukur melalui indikator yang mencerminkan persepsi positif terhadap karakteristik sifat dapat dipercaya dari pemerintah, yaitu selaras dengan dimensi *competence*, *benevolence*, dan *integrity* (Grimmelikhuijsen & Knies, 2017).

Semakin tinggi kepercayaan terhadap pemerintah, semakin aktif partisipasi yang ditunjukkan (Fathonah & Sunarso, 2023; Handaningrum & Rini, 2014). Temuan penelitian lainnya mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif antara kepercayaan politik dan partisipasi politik institusional seperti pemilu, tetapi memiliki hubungan negatif dengan partisipasi non-institusional seperti periklanan dan boikot produk (Hooghe & Marien, 2013). Selain itu, tingkat kepercayaan politik mempengaruhi partisipasi politik online, individu dengan kepercayaan politik rendah lebih cenderung menggunakan media sosial untuk berpartisipasi dalam diskusi politik dibandingkan dengan mereka yang memiliki kepercayaan politik tinggi (Koivula dkk., 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas, telah banyak penelitian mengenai pengaruh kepercayaan politik terhadap partisipasi politik (Fathonah & Sunarso, 2023; Handaningrum & Rini, 2014; Hooghe & Marien, 2013; Koivula dkk., 2021; Wahyuni & Adnan, 2024). Namun, masih terdapat kekurangan pada penelitian tersebut, yaitu hanya membahas isu-isu terkait pemilihan umum, dan belum ada yang berfokus pada isu perumusan sampai implementasi kebijakan, seperti pada isu pembangunan IKN yang tidak partisipatif. Maka dari itu, kebaruan dari penelitian ini yaitu menganalisis kepercayaan politik mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan, khususnya pada proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kemudian penelitian ini penting untuk diteliti guna mengkaji secara khusus pengaruh kepercayaan politik terhadap partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Sepaku, yang terlibat langsung dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Mengingat posisi strategis masyarakat Kecamatan Sepaku dalam pembangunan ibu kota baru, pemahaman terhadap kepercayaan politik mereka menjadi sangat penting untuk menyuarakan aspirasi lokal dalam proses pembangunan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu mengidentifikasi pengaruh kepercayaan politik terhadap partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sepaku dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah dapat memperkaya pengetahuan baru mengenai kepercayaan politik terhadap partisipasi politik, khususnya dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan untuk memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengambil kebijakan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan politik, sehingga proses pembangunan dapat lebih inklusif dan mencerminkan aspirasi masyarakat lokal di Kecamatan Sepaku. Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu kepercayaan politik berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sepaku dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Kepercayaan Politik (X) terhadap variabel Partisipasi Politik (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Sepaku dan berusia minimal 20 tahun, yang dianggap telah memiliki hak politik penuh, dengan jumlah sebanyak 24.523 penduduk (BPS, 2021). Penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* dengan jenis *cluster sampling* sebagai jenis pengambilan sampelnya. Teknik *cluster sampling* digunakan karena populasi tersebar secara geografis ke dalam beberapa wilayah administratif (desa dan kelurahan), sehingga pengambilan sampel berdasarkan kelompok-kelompok (*cluster*) wilayah menjadi lebih efisien. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjangkau populasi yang luas secara praktis tanpa mengorbankan keterwakilan sampel terhadap populasi. Dari total 11 desa dan 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Sepaku, populasi dibagi ke dalam 8 *cluster*, yaitu 6 desa dan 2 kelurahan, yang kemudian diambil sampelnya secara proporsional dari setiap cluster. Sementara itu, 5 desa dan 2 kelurahan lainnya digunakan untuk mengambil data saat uji coba instrumen penelitian. Pengambilan 8 *cluster* tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa dari *cluster* yang diambil tersebut sudah dapat merepresentasikan dari seluruh populasi. Penentuan jumlah sampel dari populasi dilakukan menggunakan rumus Slovin (Soedibjo, 2013), yaitu:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

n : Jumlah sampel

N : Total populasi (24.523)

e : margin of error (5%)

Berdasarkan rumus tersebut, jumlah sampel yang diperoleh dihitung menggunakan data dari (BPS, 2021) sebagai berikut.

Tabel 1

Sebaran Sampel

Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Sampel
Argo Mulyo	3195	53
Binuang	2005	33
Bukit Raya	2812	47
Bumi Harapan	2071	34
Maridan	3976	67
Sepaku	1888	31
Sukaraja	3874	64
Tengin Baru	3908	65
Total		394

Penelitian ini menggunakan dua instrumen utama yaitu kepercayaan politik dan partisipasi politik dalam pembangunan. Dalam penelitian ini, kepercayaan politik diukur dengan menggunakan skala *Citizen Trust in Government Organizations (CTGO)* yang dikembangkan oleh Grimmelikhuijsen & Knies, (2017), dan didasarkan pada teori kepercayaan dari Mayer dkk., (1995). Skala ini membagi kepercayaan politik menjadi tiga dimensi utama, yaitu: 1) *perceived competence* - persepsi bahwa pemerintah memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya; 2) *perceived benevolence* - persepsi bahwa pemerintah peduli terhadap kesejahteraan publik dan bertindak demi kepentingan umum.; 3) *perceived integrity* - persepsi bahwa pemerintah jujur, dapat dipercaya, dan menepati janji dalam menjalankan kebijakan. Skala ini menggunakan format Likert 5 poin mulai dari “Sangat Tidak Setuju” sampai “Sangat Setuju”. Penyusunan rancangan adaptasi aitem menggunakan output blueprint yang kemudian diajukan kepada empat *expert judgement* untuk dilakukan penilaian dan penerimaan saran. Instrumen penelitian ini memiliki nilai validitas isi aiken’s V bergerak dari 0,94 sampai dengan 1,00. Setelah dilakukannya penilaian oleh *expert judgment*, aitem tersebut diuji coba kepada responden. Dalam tahap uji coba ini, terdapat 46 responden yang memenuhi kriteria penelitian yang telah ditentukan. Setelah data diperoleh dari 46 responden, didapatkan nilai daya beda aitem berada pada rentang 0,680 – 0,869, kemudian dilakukan uji reliabilitas yang menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,949.

Instrumen partisipasi politik dalam pembangunan dari penelitian ini diukur dengan menggunakan *Participatory Behaviors Scale (PBS)* yang diadaptasi dari Talò & Mannarini, (2015), dan telah diuji konstruksi serta validitasnya oleh Bintang dkk., (2024). Skala ini

dirancang berdasarkan kerangka teori dari Ekman & Amnå, (2012) dan mencakup tiga dimensi utama yaitu: 1) *civil participation* yaitu individu terlibat dalam aktivitas politik dan mengikuti isu-isu politik yang berkembang; 2) *formal political participation* yaitu individu memiliki tujuan politik yang jelas dan secara aktif terlibat dalam kegiatan politik resmi; 3) *activism* yaitu keterlibatan individu dalam bentuk aksi protes atau demonstrasi sebagai wujud ekspresi politik. Skala ini awalnya terdiri dari 16 item dan empat dimensi, namun dimensi disengagement dihilangkan karena dianggap tidak relevan untuk fokus partisipasi politik yang aktif. Penggunaan instrumen PBS relevan dengan penelitian ini karena sesuai dengan temuan studi pendahuluan yang menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Sepaku, sebagai sampel penelitian, memiliki partisipasi politik yang bersifat aktif. Setelah dimodifikasi, skala terdiri dari 14 item yang dinyatakan valid dan reliabel. Skala ini menggunakan format Likert 4 poin dari “Sangat Tidak Setuju” hingga “Sangat Setuju”. Validitas konstruk dalam uji CFA diperoleh nilai RMSEA sebesar 0.000 ($< 0,05$) dan nilai p -value = 0,83306 $> 0,05$, yang menunjukkan model tergolong cukup baik (Bintang dkk., 2024). Kemudian peneliti menyusun rancangan modifikasi seluruh aitem dengan menambahkan konteks pembangunan IKN guna menyesuaikan latar belakang penelitian menggunakan output blueprint yang selanjutnya diajukan kepada empat expert judgment untuk dilakukan penilaian dan penerimaan saran. Instrumen penelitian ini memiliki nilai validitas aiken’s V bergerak dari 0.88 sampai dengan 1.00. Setelah dilakukannya penilaian oleh *expert judgment*, aitem tersebut diuji coba kepada responden. Dalam tahap uji coba ini, terdapat 46 responden yang memenuhi kriteria penelitian yang telah ditentukan. Setelah mendapatkan data dari 46 responden tersebut, didapatkan nilai daya beda aitem berada pada rentang 0,312 – 0,804, kemudian dilakukan uji reliabilitas yang menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,895.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Teknik ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara dua variabel, yaitu variabel Kepercayaan Politik (X) terhadap variabel Partisipasi Politik (Y). Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versi 25.

3. Hasil dan Pembahasan

Bagian hasil penelitian ini menyajikan temuan empiris yang diperoleh dari proses pengumpulan dan analisis data. Hasil penelitian disusun secara sistematis untuk menggambarkan karakteristik responden serta menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

3.1 Gambaran Responden

Pada bagian ini disajikan gambaran umum karakteristik responden penelitian yang meliputi jenis kelamin, usia, asal desa/kelurahan, dan tingkat pendidikan terakhir. Penyajian data demografi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai profil responden yang terlibat dalam penelitian sehingga dapat membantu dalam memahami konteks hasil penelitian secara lebih komprehensif. Adapun rincian karakteristik responden disajikan pada *Tabel 2* berikut.

Tabel 2

Data Demografi Responden Penelitian

Deskripsi	Jumlah (N)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	162	37,4
Perempuan	271	62,6
Usia		
20-24	153	35,3
25-29	54	12,5
30-34	50	11,5
35-39	40	9,2
40-44	45	10,4
45-49	29	6,7
50-54	32	7,4
55-59	18	4,2
60-64	4	0,9
65+	8	1,8
Asal Desa/Kelurahan		
Argo Mulyo	55	12,7
Binuang	36	8,3
Bukit Raya	53	12,2
Bumi Harapan	38	8,8
Maridan	71	16,4
Sepaku	47	10,9
Sukaraja	66	15,2
Tengin Baru	67	15,5
Pendidikan Terakhir		
SD	29	6,7
SMP	37	8,5
SMA	214	49,4
Diploma	25	5,8
S1	117	27,0
S2	11	2,5

Sumber: Data primer yang diolah oleh peneliti (2025).

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah responden sebanyak 433 orang menunjukkan keterwakilan masyarakat Kecamatan Sepaku dari berbagai latar belakang demografis. Dominasi responden perempuan mengindikasikan bahwa perempuan memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi dalam penelitian ini, yang dapat mencerminkan keterlibatan mereka dalam aktivitas sosial maupun akses terhadap survei. Dari sisi usia, mayoritas responden berada pada rentang 20–24 tahun yang termasuk dalam kelompok usia produktif awal, yang umumnya memiliki mobilitas tinggi, lebih adaptif terhadap perubahan, serta lebih aktif dalam mengakses informasi, termasuk informasi politik melalui media digital.

Ditinjau dari asal wilayah, distribusi responden yang relatif merata antar desa/kelurahan menunjukkan bahwa data yang diperoleh cukup merepresentasikan kondisi masyarakat di Kecamatan Sepaku, meskipun terdapat konsentrasi lebih besar di beberapa wilayah seperti Maridan, yang dapat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk atau kemudahan akses pengambilan data. Sementara itu, dari sisi pendidikan, dominasi lulusan SMA/ sederajat menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada tingkat pendidikan menengah, yang berpotensi memengaruhi cara pandang terhadap isu-isu politik, khususnya dalam hal pemahaman kebijakan publik dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.

3.2 Hasil Uji Asumsi

Tabel 3

Uji Normalitas

	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
Unstandardized Residual	0,018	Tidak berdistribusi normal

Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikansi $0,018 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal.

Tabel 4

Uji Linearitas

Variabel	Sig. Deviation From Linearity	Keterangan
Kepercayaan Politik dan Partisipasi Politik	0,330	Linier

Berdasarkan hasil uji linearitas diketahui nilai Sig. deviation from linearity sebesar $0,330 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara Kepercayaan Politik dengan Partisipasi Politik.

Tabel 5

Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Kepercayaan Politik	0,09	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser antara variabel independen dengan absolut residual, didapatkan nilai signifikansi $0,09 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, diketahui bahwa data residual tidak berdistribusi normal (signifikansi = $0,018 < 0,05$). Namun demikian, analisis regresi tetap dapat dilanjutkan karena asumsi normalitas dalam regresi linear tidak bersifat mutlak, terutama bila jumlah sampel besar. Menurut Azwar (2000), pelanggaran terhadap asumsi normalitas tidak serta-merta membuat hasil analisis menjadi tidak sah, terlebih jika jumlah subjek dalam penelitian cukup banyak. Dalam hal ini, ukuran sampel yang digunakan sebanyak 433 responden telah memenuhi syarat untuk menerapkan Teorema Limit Pusat, yang menjamin bahwa distribusi sampling akan mendekati normal meskipun data mentah tidak berdistribusi normal (Ghasemi & Zahediasl, 2012).

Tabel 6

Norma dan Kategorisasi Responden Penelitian

Norma	Kategorisasi	Kepercayaan Politik		Partisipasi Politik	
		N	%	N	%
$X \leq M - 1SD$	Sangat Rendah	45	10,39	71	16,40
$M - 1SD < X \leq M$	Rendah	86	19,86	176	40,65
$M < X \leq M + 1SD$	Tinggi	107	24,71	156	36,03
$X > M + 1SD$	Sangat Tinggi	195	45,03	30	6,93

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa mayoritas responden menunjukkan tingkat kepercayaan politik yang sangat tinggi (45,03%). Namun demikian, tingkat partisipasi politik justru paling dominan berada pada kategori rendah (40,65%). Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tingkat kepercayaan terhadap sistem politik dengan tingkat keterlibatan dalam aktivitas politik secara langsung. Pada variabel kepercayaan politik, kategori sangat rendah menggambarkan individu yang memiliki persepsi negatif terhadap pemerintah, seperti meragukan kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas, tidak percaya pada niat baik pemerintah terhadap masyarakat, serta menilai rendah integritas dalam proses pemerintahan. Kategori rendah menunjukkan

bahwa individu masih memiliki keraguan terhadap kinerja dan integritas pemerintah, meskipun tidak sepenuhnya menolak legitimasi institusi politik. Kategori tinggi mencerminkan adanya keyakinan yang cukup baik terhadap kemampuan, niat, dan integritas pemerintah, meskipun masih terdapat sikap kritis terhadap beberapa kebijakan. Sementara itu, kategori sangat tinggi menunjukkan tingkat kepercayaan yang kuat, di mana individu meyakini bahwa pemerintah mampu, beritikad baik, dan menjalankan tugas secara konsisten sesuai dengan kepentingan publik.

Sementara itu, pada variabel partisipasi politik, kategori sangat rendah menggambarkan individu yang hampir tidak terlibat dalam aktivitas politik, baik secara formal maupun non-formal, termasuk minim dalam mengakses informasi politik. Kategori rendah menunjukkan keterlibatan yang terbatas pada aktivitas pasif seperti mengikuti berita politik atau diskusi ringan tanpa keterlibatan lebih lanjut. Kategori tinggi mencerminkan keterlibatan yang lebih aktif, seperti mengikuti kegiatan politik formal, berpartisipasi dalam diskusi publik, atau terlibat dalam komunitas yang berkaitan dengan isu sosial-politik. Adapun kategori sangat tinggi menunjukkan partisipasi yang intens dan aktif, seperti keterlibatan dalam kampanye politik, aksi kolektif (demonstrasi, petisi), serta upaya langsung dalam memengaruhi kebijakan publik.

Klasifikasi partisipasi politik kategori rendah ini cenderung berkorelasi dengan dimensi *civil participation* dalam kerangka *Participatory Behaviors Scale (PBS)*, yang mencakup bentuk partisipasi dasar seperti membaca berita politik, mengikuti akun media sosial bertema politik, atau berdiskusi secara terbatas (Bintang dkk., 2024). Aktivitas ini belum mencerminkan keterlibatan dalam bentuk partisipasi politik yang lebih aktif seperti kampanye politik (*formal participation*) maupun aksi kolektif seperti demonstrasi atau petisi (*activism*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun responden menunjukkan tingkat kepercayaan politik yang tinggi, bentuk partisipasi politik yang dominan masih bersifat informatif, sehingga kepercayaan terhadap sistem politik belum sepenuhnya mendorong keterlibatan dalam praktik politik yang lebih aktif dan substansial.

3.3 Hasil Uji Hipotesis

Tabel 7

Hasil Uji Hipotesis

Variabel	B	t Hitung	Sig.	R Square
Kepercayaan Politik	27,214	18,409	0,000	,058
Partisipasi Politik	,237	5,136		

Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana yang telah dilakukan, didapatkan nilai signifikansi antara kedua variabel tersebut adalah $0,000 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan partisipasi politik (X) secara signifikan berpengaruh terhadap partisipasi politik (Y). Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat kepercayaan politik berhubungan dengan semakin tingginya tingkat partisipasi politik. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Selain itu, didapatkan pula persamaan regresi sebagai berikut;

$$Y = a + bX$$

$$Y = 27,214 + 0,237X$$

Pada persamaan tersebut diketahui bahwa angka konstan (a) sebesar 27,214 sedangkan nilai koefisien regresi (b) sebesar 0,237. Nilai konstanta sebesar 27,214 memiliki arti bahwa nilai konsisten variabel Partisipasi Politik adalah 27,214. Koefisien regresi untuk variabel X sebesar 0,237 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pada nilai Kepercayaan Politik akan diikuti dengan peningkatan sebesar 0,237 pada nilai Partisipasi Politik. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R Square) yang diperoleh sebesar 0,058 mengindikasikan bahwa variabel bebas, yaitu Kepercayaan Politik, memberikan kontribusi pengaruh positif terhadap variabel terikat, Partisipasi Politik, sebesar 5,8%. Sedangkan sisanya sebesar 94,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

3.4 Pembahasan

Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kepercayaan politik terhadap partisipasi politik. Hasil ini mengindikasikan bahwa kepercayaan politik memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat Sepaku, meskipun kontribusinya relatif kecil. Tingkat kontribusi yang terbilang rendah ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain selain kepercayaan politik yang juga dapat memengaruhi partisipasi politik. Salah satunya adalah kesadaran politik, sebagaimana diungkap dalam penelitian Fathonah & Sunarso, (2023), yang menemukan bahwa kesadaran politik memiliki kontribusi sebesar 43% terhadap partisipasi politik, lebih tinggi dibandingkan kepercayaan politik yang hanya 35,6%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kepedulian warga terhadap isu-isu politik turut mendorong partisipasi mereka dalam proses politik.

Berdasarkan norma kategorisasi menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kepercayaan politik (X) yang sangat tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Sepaku pada umumnya memiliki keyakinan yang cukup kuat terhadap pemerintah. Tingginya tingkat kepercayaan politik ini didukung dengan distribusi demografi responden, yaitu kelompok usia 20-24 tahun mendominasi partisipasi penelitian. Kelompok usia ini dikenal lebih aktif dalam mengakses informasi politik melalui

media sosial dan media *digital*, sehingga lebih terpapar pada narasi pemerintah terkait pembangunan IKN. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa mayoritas pemilih berasal dari kelompok usia 20–29 tahun dan menjadikan media sosial sebagai sumber utama informasi politik, yang menunjukkan bahwa generasi muda memiliki akses informasi politik yang lebih tinggi melalui platform digital (Simbolon & Arifin, 2025). Pernyataan tersebut juga didukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa masyarakat dengan akses informasi melalui literasi digital memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di ranah *digital* (Silvia, 2024). Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan aspek *perceived competence* yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kompetensi pemerintah dalam menjalankan proyek strategis dapat meningkatkan tingkat kepercayaan politik (Grimmelikhuisen & Knies, 2017). Dalam pembangunan IKN, kepercayaan politik dapat terbentuk melalui sosialisasi yang intensif terkait manfaat dari proyek tersebut bagi masyarakat lokal, terutama bagi usia produktif yang lebih melek informasi politik.

Meskipun tingkat kepercayaan politik berada pada kategori sangat tinggi, hasil dari kategorisasi partisipasi politik (Y) justru menunjukkan hasil yang kontras. Sebagian besar responden berada pada kategori rendah. Temuan ini menunjukkan adanya gap antara tingkat kepercayaan politik dengan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sepaku. Kelompok usia 20-24 tahun yang mendominasi responden juga menunjukkan kecenderungan mengikuti berita terkait IKN tanpa terlibat langsung dalam aktivitas politik formal. Dari hasil tersebut selaras dengan penelitian Wahyuni & Adnan, (2024) yang menyatakan bahwa generasi muda di Indonesia cenderung hanya berpartisipasi pada aktivitas politik seperti voting, sedangkan keterlibatan dalam diskusi publik, kampanye, atau diskusi kebijakan masih terbilang rendah. Selain itu, tingkat pendidikan responden yang mayoritas SMA/ sederajat juga dapat mempengaruhi rendahnya partisipasi politik. Menurut Iqrima dkk., (2019) menemukan bahwa faktor jenis kelamin serta tingkat pendidikan memiliki andil dalam memengaruhi tingkat partisipasi politik pada pemilih pemula. Dengan demikian, meskipun masyarakat memiliki kepercayaan politik yang tinggi, namun keterbatasan pengetahuan dan kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam pembangunan IKN dapat menjadi penghambat bagi mereka untuk berpartisipasi lebih aktif.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa adanya hubungan signifikan antara kepercayaan politik dengan partisipasi politik (Akhrani dkk., 2018). Individu yang memiliki persepsi positif dan kepercayaan yang tinggi terhadap dunia politik cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam aktivitas politik dibandingkan mereka yang merasa tidak puas atau kecewa dengan pengalaman politiknya. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tingginya

kepercayaan politik dapat memunculkan perasaan puas serta mendorong dukungan sukarela terhadap aktivitas politik (Matulesy & Samsul, 2013). Temuan ini juga selaras dengan studi (Paige, 1971), yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan politik menjadi faktor utama dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik formal. Kepercayaan politik berfungsi sebagai cerminan dari harapan masyarakat terhadap pemerintah, keyakinan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik (Haryanto dkk., 2015; Saad & Salman, 2013).

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai kepercayaan politik dan partisipasi politik masyarakat yang secara langsung terdampak oleh proyek nasional, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Temuan bahwa kepercayaan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik, meskipun dalam skala yang relatif kecil, memberikan dasar penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk lebih mengutamakan pendekatan yang membangun kepercayaan politik guna mendorong partisipasi politik lebih aktif. Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, di antara adalah keterbatasan cakupan wilayah yang terbatas pada Kecamatan Sepaku, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah yang terdampak oleh pembangunan IKN. Komposisi yang tidak seimbang dari jenis tingkat pendidikan responden juga dapat memengaruhi objektivitas temuan, karena perbedaan partisipasi politik masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini masih belum sepenuhnya mencerminkan kondisi secara menyeluruh pada populasi masyarakat yang terdampak pembangunan IKN.

4. Simpulan

Hasil analisis data menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari kepercayaan politik terhadap partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sepaku dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai signifikansi pada uji regresi linear sederhana. Kepercayaan politik memberikan pengaruh sebesar 5,8% terhadap partisipasi politik. Meskipun kontribusinya tergolong kecil, pengaruh ini tetap penting mengingat bahwa kepercayaan politik mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap kompetensi, integritas, dan kepedulian pemerintah dalam menjalankan proyek strategis nasional seperti pembangunan IKN. Meskipun besarnya kontribusi tersebut tergolong kecil, pengaruhnya tetap penting karena kepercayaan politik mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kompetensi, integritas, dan kepedulian pemerintah dalam menjalankan proyek strategis nasional seperti pembangunan IKN.

Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar meneliti variabel independen lain yang memiliki potensi dapat memengaruhi partisipasi politik, seperti kesadaran politik, tingkat

pendidikan, atau akses terhadap informasi politik. Untuk masyarakat sebagai subjek penelitian, penting untuk meningkatkan kepercayaan yang dimiliki terhadap pemerintah sehingga dapat mewujudkan partisipasi aktif dalam pembangunan, seperti melalui forum diskusi publik atau pengawasan kebijakan. Sementara itu, bagi instansi terkait seperti pemerintah dan pembuat kebijakan, perlu dilakukan upaya peningkatan kepercayaan politik bagi masyarakat guna meningkatkan partisipasi politik dalam proses pembangunan IKN.

Daftar Rujukan

- Akhrani, L. A., Imansari, F., & Faizah, F. (2018). Kepercayaan Politik dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula. *Mediapsi*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2018.004.01.1>
- Alamsyah, N. (2019, Desember 9). *Standar Etika Pemandangan Ibu Kota*. detikNews.
- Bintang, R. S., Mutiah, D., & Rangga, F. (2024). Uji Validitas Konstruksi Skala Participatory Behaviors Scale (PBS): Pendekatan dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(3), 2137–2144. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i3.6627>
- BPS. (2021). *Kecamatan Sepaku Dalam Angka 2021*.
- BPS. (2024). *Kecamatan Sepaku Dalam Angka 2024*.
- Cox, R. . (2010). *Environmental communication and the public sphere, 2nd ed.* Sage.
- Dewi, M. R., Diyah Syafitri, E., & Dewanti, N. (2020). Analisis Kesiapan Masyarakat Kecamatan Sepaku dan Samboja Terhadap Rencana Pemandangan Ibu Kota Negara Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 16(4), 300–313. <https://doi.org/10.14710/pwk.v16i4.32368>
- Ekman, J., & Amnå, E. (2012). Political participation and civic engagement: Towards a new typology. *Human Affairs*, 22(3), 283–300. <https://doi.org/10.2478/s13374-012-0024-1>
- Fathonah, D. N., & Sunarso. (2023). Pengaruh Kesadaran dan Kepercayaan Politik terhadap Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Desa Sidomulyo Tahun 2022. *Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 12(05), 543–551.
- Faturahman, A. A. (2024, Agustus 12). *Aktivis dan Warga Terdampak Pembangunan IKN Bentangkan Spanduk Indonesia is Not For Sale*. Tempo.co.
- Faustina, R., Bayu, A., Putri, D., Batari, C., & Putri, K. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)*. <https://www.researchgate.net/publication/371575487>
- Grimmelikhuijsen, S., & Knies, E. (2017). Validating a scale for citizen trust in government organizations. *International Review of Administrative Sciences*, 83(3), 583–601. <https://doi.org/10.1177/0020852315585950>

- Hamdani, R. S. (2020). Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(1), 43–62. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.43-62>
- Handaningrum, R., & Rini, A. P. (2014). Persepsi Terhadap Kualitas Calon Legislatif (Caleg), Dan Kepercayaan Politik (Political trust) dengan Partisipasi Politik. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(03), 223–236.
- Haryanto, H. C., Rahmania, T., Mubarok, A. R., Doyo, A. B., Fauzi, H., & Fajri, E. (2015). Bagaimanakah Persepsi Keterpercayaan Masyarakat terhadap Elit Politik? *Jurnal Psikologi*, 42(3), 243–258.
- Hasanah, R. L., Mulyady, S., Azahra, S., Nuraeni, S., & Ridwan. (2023). Peran Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pembuatan Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(8).
- Hooghe, M., & Marien, S. (2013). A Comparative Analysis Of The Relation Between Political Trust And Forms Of Political Participation In Europe. *European Societies*, 15(1), 131–152. <https://doi.org/10.1080/14616696.2012.692807>
- Iqrima, N., Zakso, A., & Supriadi, S. (2019). Tingkat Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Gubernur 2018 Ditinjau Dari Jenis Kelamin Dan Pendidikan. Dalam *FKIP Universitas Tanjungpura* (Vol. 2, Nomor 2).
- Koivula, A., Malinen, S., & Saarinen, A. (2021). The voice of distrust? The relationship between political trust, online political participation and voting. *Journal of Trust Research*, 11(1), 59–74. <https://doi.org/10.1080/21515581.2022.2026781>
- Mahardika, A. G., & Saputra, R. (2022). Problematika yuridis prosedural pemindahan ibu kota negara baru dalam sistem ketatanegaraan indonesia. *Hukum Tata Negara UIN Sayyid Ali Rahmatullah*, 2(1), 1–19. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_ibu_kota_baru_di_penajam_paser_
- Matulessy, A., & Samsul. (2013). Political Efficacy, Political Trust Dan Collective Self Esteem Dengan Partisipasi Dalam Gerakan Mahasiswa. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 04(01), 84–106. www.tempointeraktif.com,
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & David Schoorman, F. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. *Source: The Academy of Management Review*, 20(3), 709–734.
- Nelly, S. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Sociopolitico*, 6(1), 86–94.
- Paige, J. M. (1971). Political Orientation and Riot Participation. *Source: American Sociological Review*, 36(5), 810–820.

- Pramesti, K. I., & Jumansyah. (2024). Prospek Pembangunan Desa Bumi Harapan di Kecamatan Sepaku Pasca Ditetapkannya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur Prospects for the Development of Bumi Harapan Village in Sepaku District After the Establishment of the Archipelago Capital in East Kalimantan, Samarinda City. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 76–85.
- Purwaniawan, N. B. (2023, September 18). Kesbangpol Penajam petakan daerah partisipasi pemilih rendah. *ANTARA KALTIM*.
- Saad, S., & Salman, A. (2013). The role of values and attitudes in political participation. *Asian Social Science*, 9(8), 9–16. <https://doi.org/10.5539/ass.v9n8p9>
- Sa'id, M., Prasetyo, V. A., Chusniyah, T., & Noorrizki, R. D. (2019). Voting behavior as Political Participation: The Role of Trust Inpolitical Candidate and Personal Affect. *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, 100–106.
- Silviah, R. (2024). Dampak Literasi Digital: Kepercayaan Publik, Partisipasi Politik dan Media Sosial (Literature Review Ilmu Sosial dan Politik). *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, 2(1), 38–45. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v2i1>
- Simbolon, G. M., & Arifin, A. (2025). Analisis Faktor-Sosio Demografis Dalam Partisipasi Pemilih Meutya Hafid Pada Pemilihan Legislatif 2024 Di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Lanskap Politik*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.31942/jlp.2025.3.1>
- Soedibjo, B. S. (2013). *Pengantar metode penelitian*. Universitas Nasional Pasim.
- Talò, C., & Mannarini, T. (2015). Measuring Participation: Development and Validation the Participatory Behaviors Scale. *Social Indicators Research*, 123(3), 799–816. <https://doi.org/10.1007/s11205-014-0761-0>
- Wahyu, A. M., & Sa'id, M. (2020). Semakin religius, semakin intoleran? Peran kepercayaan politik sebagai variabel moderator. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9, 24–35.
- Wahyuni, S., & Adnan, M. F. (2024). Partisipasi Politik Generasi Milenial Pada Pemilihan Presiden 2024 di Kota Padang. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 1–18. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1831>